

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Keaslian Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pajak	14
A.1. Definisi Pajak.....	14
A.2. Fungsi Pajak.....	15
A.3. Dasar Teori Pemungutan Pajak.....	16
A.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	17
B. Pemeriksaan Bukti Permulaan	19
C. Tindak Pidana di bidang Perpajakan	23
D. Rahasia Bank	26
D. Intensifikasi Pajak.....	28
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Bahan Penelitian	31
C. Cara Pengumpulan Bahan Penelitian	34

D. Pengolahan Dan Analisis Bahan.....	34
E. Hambatan Dalam Penelitian.....	35
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan melalui rahasia bank dalam upaya intensifikasi pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.....	37
A.1. Pengaturan mengenai Kedudukan Rahasia Bank terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.....	37
A.2. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang membutuhkan Rahasia Bank di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta	44
A.3. Proses untuk mendapatkan rahasia bank terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.....	47
B. Hambatan dalam Permintaan Data yang Dirahasiakan oleh Bank dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	71
C. Kedudukan Rahasia Bank terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang membutuhkan Rahasia Bank dalam upaya intensifikasi Pajak terkait pemenuhan Hak-hak Wajib Pajak.....	85
BAB V	94
KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. KESIMPULAN	94
B. SARAN.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR SINGKATAN

BI	: Bank Indonesia
Himbara	: Perhimpunan Bank-Bank Negara
IBI	: Ikatan Bankir Indonesia
LPBP	: Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan
MPOL	: Menghitung Pajak Orang Lain
MPS:	Menghitung Pajak Sendiri
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OPDP	: Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
Perbanas	: Perhimpunan Bank Nasional
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMK Tata	Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
PP Tata	Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan.
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPT	: Surat Pemberitahuan
UU KUP	: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)
UU Perbankan	: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.